



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malli 02981 Telepon (0474) 321 489,
Email :Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 440 / 03 / SK / DINKES / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu mengadakan perubahan/revisi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa pegawai tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP GU dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. menyiapkan laporan keuangan;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

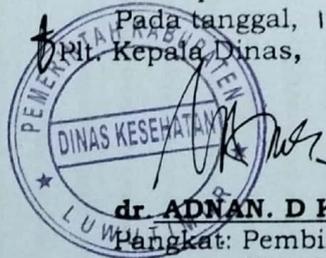
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melakukan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HP;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/PA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 13 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas,



dr. ADNAN. D KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur

Nomor : 430/ 03 / S/ DINKES /2023

Tanggal : 13 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	USWATUN HASANAH	PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)		
1	ANDI TULLENG, SKM . M. Kes	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD 2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 Penyediaan Jasa surat Menyurat 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 17 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE
			18 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			19 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			20 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
			22 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
2	YETRIANI BOSA, SKM. M. Kes	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengadaan Mebel	
			• Kursi Kerja Staf	
			• Meja Kerja Eselon IV	
			• Kursi Kerja Eselon III	
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			• Laptop	
			• PC Komputer	
			• Printer	
			• Scanner	
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
			• AC 1/2 PK	
			• AC 2 PK	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			2 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	

f

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEM
3	LUTPI, SKM	PEJABAT PEMBUAT KONTINGEN (PPK)	<p>PROGRAM / SUB KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Sakti beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Sakti Malili 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Operasional Roda 4 <p>PROGRAM / SUB KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan UGD PKM Wasuponda • Pembangunan Selaer Penghubung PKM Tinsampu • Penataan Halaman PKM Bantiang • Pembangunan Pagor Bantiang • Pembangunan Pagor PKM Malihona • Pembangunan Pagor PKM Parumpenai 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Ruang PUSTU Nuhla <p>PROGRAM / SUB KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Pemassangan Aksesoris dan Pintu UTD • Pembangunan IPAL UTD <p>PROGRAM / SUB KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian Urges Kesehatan Khusus 2. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 3. Pengkajian Sistem Informasi Kesehatan <p>PROGRAM / SUB KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 2. Pengkajian Jaminan Kesehatan Masyarakat 3. Operasional Pelayanan Puskesmas 	
PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN)				

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
4	NURBAYA, SKM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PROGRAM/SUB KEGIATAN 2 Pengembangan Puskesmas * Pemasangan KWH Puskesmas PONE * Penyambungan Listrik PKM Nuha PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Pengembangan Puskesmas * Rehab Gedung PKM Angkona * Pembangunan Selasar Penghubung PKM Lampia * Pembangunan Selasar Penghubung PKM Tomoni * Penataan Halaman PKM Wotu * Pembangunan Ruang Partisi Puskesmas Bone Pute * Pembangunan WC Puskesmas Bone Pute 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya * Penataan Halaman PUSTU Karambua * Pembangunan Pagar PUSTU Watangpanua 3 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan * Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Bone Pute	
5	ANDI TULLENG, SKM . M. Kes	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	

f

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			4 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
6	NELLI MUALIM, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			3 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			2 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE
7	MASYHURI RACHIM, S. Si	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Pengadaan Obat dan Vaksin	
		PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 2 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, (BMHP), Makanan dan Minuman Ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tertaga Kesehatan 6 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	



Pt. Kepala Dinas,

dr. ADNAN. D KASIM

PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660502 200003 1 004